

EFEKTIVITAS PENDIRIAN AKADEMI KOMUNITAS DALAM Mendukung MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

THE EFFECTIVENESS OF COMMUNITY COLLEGE IN SUPPORTING THE MASTER PLAN FOR THE ACCELERATION AND EXPANSION OF INDONESIA'S ECONOMIC DEVELOPMENT (MP3EI)

Ikhya Ulumudin
Puslitjak, Balitbang Kemdikbud
Gedung E lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta Pusat
e-mail: ikhya.puslitjak@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 07/04/2014, Direvisi akhir tanggal: 10/09/2014, Disetujui tanggal: 01/02/2015

Abstract: *This study is aimed at figure out the suitability of study programs in the community college to the region's potential and the level of interest of senior secondary school graduates in continuing to community college in order to support the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (MP3EI) program. The method used was survey, while the data and information were gathered through Focus Group Discussion and questionnaire. Result showed that, study programs in Community College of Blitar were less suitable with the region's potential, as they only represented the needs for general workforce and senior secondary school graduates were more interested in continuing their study to Blitar Community College.*

Keywords: *Community College, Region's Potential, MP3EI.*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian program studi pada Akademi Komunitas (AK) terhadap potensi daerah dan mengetahui animo lulusan sekolah menengah (SM) melanjutkan ke AK guna mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei. Data dan informasi studi dikumpulkan melalui Focuss Group Discussion (FGD) dan penyebaran kuesioner. Simpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa program studi AK di Kota Blitar masih kurang sesuai dengan potensi daerah, karena program studi hanya mewakili kebutuhan tenaga kerja secara umum saja dan AK Kota Blitar mendapatkan animo yang cukup besar dari lulusan SM.*

Kata kunci: *Akademi Komunitas, Potensi Daerah, MP3EI.*

Pendahuluan

Pada tahun 2012 Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah meluncurkan program pada jenjang pendidikan tinggi setingkat diploma satu (D1) dan diploma dua (D2) yang disebut Akademi Komunitas (AK). Pendirian AK tersebut merupakan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Republik Indonesia, 2012). Pada Pasal 59 ayat

7 disebutkan bahwa "Akademi komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus". Tujuan pendirian AK ini salah satunya terkait dengan upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada perguruan tinggi, sekaligus

merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi Indonesia.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161/P/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili menetapkan 35 kabupaten/kota untuk mendirikan AK. Kabupaten/kota penyelenggara AK sesuai dengan Kepmendikbud dimaksud dapat dilihat pada Tabel 1.

Dari 35 AK tersebut, sebanyak 20 AK yang di biyai dari sumber APBN dan 15 AK bersumber dari APBNP. Prospek ke depan pemerintah bersama Pemerintah Daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) AK dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah baik negeri maupun swasta.

Pendirian AK di 35 Kabupaten/Kota tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan sumber daya unggulan daerah dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Sebagaimana dipahami bahwa Pemerintah telah menetapkan program MP3EI dengan membagi wilayah

Indonesia menjadi enam koridor, yakni: 1) koridor ekonomi Sumatera, mempunyai tema pembangunan sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional; 2) koridor ekonomi Jawa, memiliki tema pembangunan sebagai pendorong industri dan jasa nasional; 3) koridor ekonomi Kalimantan, memiliki tema pembangunan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional; 4) koridor ekonomi Sulawesi, memiliki tema pembangunan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan nasional; 5) koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara, memiliki tema pembangunan sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional; dan 6) koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku, memiliki tema pembangunan sebagai pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional (Republik Indonesia, 2011). Keunggulan masing-masing koridor tersebut perlu didorong dan dikembangkan untuk percepatan pembangunan ekonomi nasional.

Tabel 1 Lokasi Pendirian Akademi Komunitas

No	Lokasi	Provinsi	No	Lokasi	Provinsi
1	Kab. Ponorogo	Jawa Timur	19	Kab.Rej. Lebong	Bengkulu
2	Kab. Sidoarjo	Jawa Timur	20	Kab.Muko-muko	Bengkulu
3	Kab. Nganjuk	Jawa Timur	21	Kab.D. Serdang	Sumut
4	Kab. Pacitan	Jawa Timur	22	Tanah Datar	Sumbar
5	Kab. Situbondo	Jawa Timur	23	Kota PklpngTengah	Babel
6	Kab. Sumenep	Jawa Timur	24	Kabkot Waringin T	Kalteng
7	Kab. Bojonegoro	Jawa Timur	25	Kota Bontang	Kaltim
8	Kab. Tuban	Jawa Timur	26	Kab. Singkawang	Kalbar
9	Kota Blitar	Jawa Timur	27	Kab. Sumbawa	NTB
10	Kab. Temanggung	Jawa Tengah	28	Kota Mataram	NTB
11	Kab. Jepara	Jawa Tengah	29	Kab. Smb.Timur	NTB
12	Kab. Cianjur	Jawa Barat	30	Kab. Gianyar Bali	Bali
13	Kab. Karawang	Jawa Barat	31	Kab. Nagekeo	NTT
14	Kab.Aceh Barat	D. I. Aceh	32	Kabupaten Kolaka	Sulteng
15	Kota Prabumulih	Sumsel	33	Kab.Pulau Buru	Maluku
16	Kab.Lahat	Sumsel	34	Kab. Manukwari	Papua Barat
17	Kab.Pagar Alam	Sumsel	35	Kab. Keerom	Papua
18	Kab. Lampung	Lampung			

Sumber: SK Mendikbud Nomor 161/P/2012

Pendirian AK seyogyanya terkait dengan upaya pengembangan potensi daerah. Sumber daya alam di setiap koridor perlu dimanfaatkan, dipacu, dan dikembangkan dengan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kebutuhan mengembangkan MP3EI semakin mendesak untuk meletakkan fondasi perekonomian yang kuat di setiap wilayah. AK sebagai satu bentuk pendidikan tinggi vokasi atau kejuruan diharapkan dapat berfungsi ganda, di satu sisi sebagai energi yang mampu mendorong pembangunan ekonomi di daerah, di sisi lain mampu menciptakan peluang usaha/ kerja di daerah sendiri. Oleh karenanya AK tidak berdiri sendiri, melainkan diselaraskan dengan penerapan konsep MP3EI sebagai upaya perluasan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu kriteria yang dipersyaratkan dalam pendirian AK, yaitu memperhatikan potensi daerah sesuai dengan koridor ekonomi yang dimiliki daerah. Diharapkan program studi pada AK relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 48 tahun 2013 tentang pendirian, perubahan, dan pencabutan izin, khususnya pasal 18 yang mengatakan dalam proposal pembukaan program studi dalam AK melalui analisis potensi daerah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013)

Pendirian AK di 35 Kabupaten/Kota diharapkan pula berperan dalam mendorong lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut juga terkait dengan keberhasilan penuntasan Wajib Pendidikan Dasar 9 tahun perlu diimbangi dengan peningkatan lulusannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya peningkatan lulusan pendidikan menengah tersebut perlu didorong untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Pada tahun 2013 menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengemukakan, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi baru mencapai 29,9 persen, sementara pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat 40 persen pada 2025 (Nuh,

2013). Upaya ini merupakan tantangan dan tuntutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global yang ditandai dengan iklim kompetitif yang semakin ketat antar bangsa di dunia. AK diharapkan dapat diisi dan diminati lulusan sekolah menengah (SM), sehingga mampu meningkatkan angka melanjutkan lulusan SM ke perguruan tinggi, sekaligus berdampak pada peningkatan APK perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas, secara umum rumusan masalah dalam studi ini yaitu bagaimana efektivitas pendirian AK dalam mendukung program MP3EI? Secara khusus rumusan masalahnya yaitu: apakah program studi AK di Kota Blitar telah sesuai dengan potensi daerah dan bagaimana animo lulusan SM melanjutkan ke AK? Terkait dengan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini secara umum, yaitu mengetahui efektivitas pendirian AK dalam mendukung program MP3EI. Lebih khusus tujuannya yaitu untuk mengkaji kesesuaian program studi AK di Kota Blitar dengan potensi daerah dan mengkaji animo lulusan SM melanjutkan ke AK dalam rangka untuk menemukan alternatif saran kebijakan guna menyusun strategi pelaksanaan AK yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan daerah dan pembangunan ekonomi nasional.

Kajian Literatur

Akademi Komunitas

Akademi komunitas merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan mampu meningkatkan SDM guna mendayagunakan dan mengembangkan kemampuan lokal. Akademi komunitas adalah pendidikan formal setingkat perguruan tinggi, tetapi memiliki perbedaan dengan jenis perguruan vokasi lain seperti politeknik dan akademi. Politeknik merupakan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Demikian halnya telah lama dikenal

perguruan tinggi akademi, merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu. Sedangkan AK merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu (D-1) dan/atau diploma dua (D-2) dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus (Gumelar, 2012).

Dasar hukum pendirian AK tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal yang mengatur pendirian AK yaitu: Pasal 59 ayat (1) mengatur tentang bentuk Perguruan Tinggi salah satunya adalah akademi komunitas; Pasal 59 ayat (7) mengamanatkan: Akademi komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus; Pasal 81 ayat (1) diamanatkan bahwa Pemerintah bersama Pemerintah Daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit satu AK dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di Kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan. Selanjutnya, Pasal 81 ayat (2) AK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

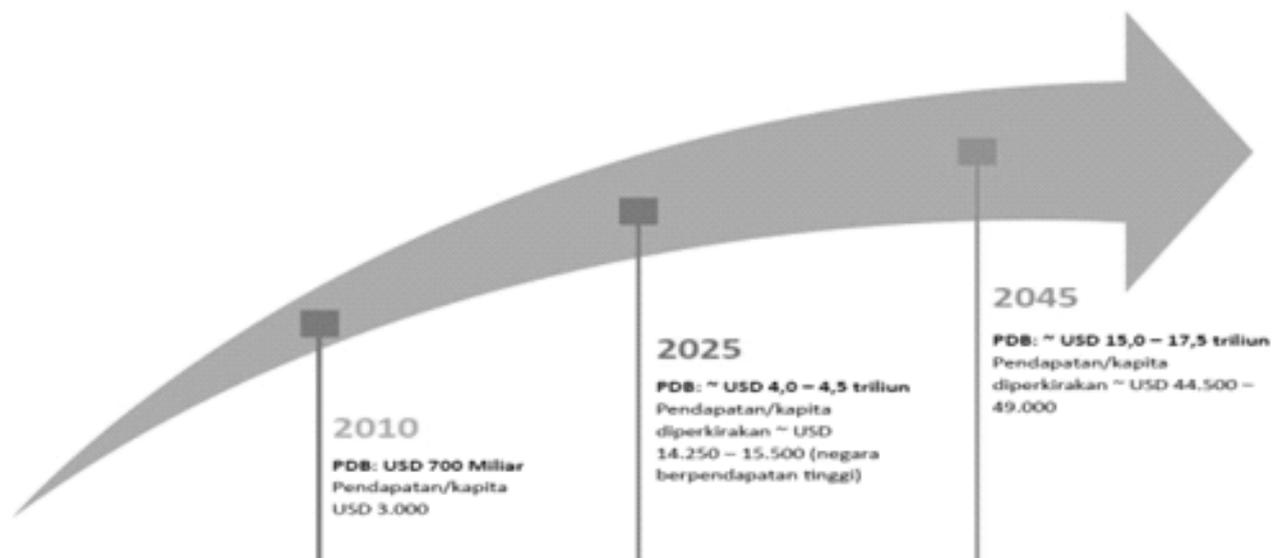
Hakikatnya, tujuan didirikan AK antara lain untuk: 1) meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan daerah maupun industri daerah; 2) memperluas akses pendidikan tinggi atau APK perguruan tinggi; 3) mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah sesuai dengan potensi wilayah. Dalam rangka mewujudkan tujuan didirikannya AK tersebut, kurikulum disusun berdasarkan: 1) standar kompetensi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

2) metode pembelajaran dirancang dengan lebih mengutamakan keterampilan kerja dengan komposisi 60–70% praktek dan kerja industri serta 30–40% teori; dan 3) lulusan AK diharapkan memperoleh kompetensi sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di daerah, atau dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi yang sesuai kebutuhan industri/mandiri. Sasaran Peserta didik AK adalah lulusan pendidikan menengah (SMA, SMK, MAN atau sederajat) baik yang belum maupun sudah bekerja (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012).

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Selama lebih dari enam dasawarsa semenjak merdeka, Indonesia telah mengalami beragam kemajuan di bidang pembangunan ekonomi. Kemajuan tersebut tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980 dan 2010, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 0,39 ke 0,60. Indonesia juga memainkan peran yang cukup besar di perekonomian global, saat ini Indonesia menempati urutan ke-17 terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga mengalami peningkatan pendapatan per kapita (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, 2014).

Strategi utama yang dilaksanakan dalam merealisasikan MP3EI, antara lain: 1) peningkatan potensi ekonomi wilayah melalui koridor ekonomi; 2) penguatan konektivitas nasional; 3) penguatan kemampuan SDM dan Iptek nasional. Pada tahun 2010 pendapatan perkapita sebedar USD 3.000 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 700 Miliar. Melalui strategi MP3EI, diharapkan perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi akan menempatkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per kapita berkisar antara USD 14.250 - USD 15.500 dengan nilai total PDB berkisar antara USD 4 - 4,5 triliun. Kemudian ditahun 2045 pendapatan



Sumber: Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, 2014

Grafik 1 Target pencapaian pendapatan per kapita sampai tahun 2045 dengan program MP3EI

perkapita diperkirakan USD 44.500 - 49.000 dengan PDB berkisar antara USD 15-17,5 Triliun.

Meski demikian, dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan, terutama dalam menghadapi ekonomi global. Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang visinya "Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur", maka dikeluarkan *masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan visi utama 1) peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; 2) mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional; dan 3) mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang ber-

kelanjutan, menuju *innovation-driven economy* (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, 2014).

Terkait dengan hal tersebut untuk melakukan koordinasi pelaksanaan MP3EI, pada 20 Mei 2011 telah dibentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011-2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Lembaga yang diketuai oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono dibentuk berdasarkan Perpres No. 32/2011 Pasal 4 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI). Tugas-tugas KP3EI yaitu 1) melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI; 2) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MP3EI; dan 3) menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI.

Keunggulan Lokal

Menurut Martasuta (2010) pengertian pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan

lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Selanjutnya, pemerintah mendefinisikan pendidikan berbasis keunggulan lokal di SMA adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada SMA sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik (Direktoran Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008).

Dari beberapa pengertian keunggulan lokal tersebut diatas, keunggulan lokal dapat diartikan sebagai segala hal yang merupakan karakteristik daerah atau potensi daerah yang mencakup aspek ekonomi, budaya, geografis dan lain-lain. Sebagai contoh Kota Denpasar, memiliki potensi pariwisata. Pemerintah dapat melakukan sejumlah upaya dan program agar potensi tersebut dapat diangkat menjadi keunggulan lokal. Salah satunya dengan mendirikan AK dengan program studi terkait dengan pariwisata.

Efektifitas

Pengertian efektifitas menurut kamus bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2008) adalah ada efeknya/akibatnya/pengaruhnya atau dapat membawa hasil. Sementara itu dalam Wikipedia bahasa Indonesia (2014) pengertian efektivitas dipahami sebagai pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dari pengertian efektifitas tersebut, dalam kajian ini yang dimaksud dengan efektifitas adalah keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Salah satu tujuan AK adalah untuk mengetahui apakah program studi AK telah sesuai dengan potensi daerah, selain

itu untuk mengetahui bagaimana animo lulusan SM melanjutkan ke AK?

Peningkatan SDM melalui Akademi Komunitas

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang ditransfer dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian (Ensiklopedia bebas, 2014). Selanjutnya menurut UU nomor 20 tahun 2003, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian pendidikan dapat dikatakan sebagai proses pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon tenaga kerja.

Oleh sebab itu, pendidikan memiliki peran yang strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Peran pendidikan dalam pembangunan nasional disampaikan oleh Wahyono (2012) antara lain: pertama, mengembangkan teknologi. Hasil pendidikan adalah orang terdidik yang mempunyai kemampuan melaksanakan penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan teknologi baru. Kedua, menjadikan tenaga produktif dalam bidang konstruksi, orang-orang terdidik hasil pendidikan bisa masuk dan aktif bekerja di bidang konstruksi bangunan baik pabrik maupun perusahaan. Dimana dari pabrik dan perusahaan inilah akan dihasilkan berbagai kebutuhan hidup. Ketiga, menjadikan tenaga produktif yang menghasilkan barang dan jasa. Orang-orang terdidik hasil pendidikan juga memiliki keterampilan untuk menghasilkan barang dan jasa. Mereka bisa menjadi karyawan di sebuah pabrik atau

perusahaan dan mengandalkan skill mereka masing-masing. Keempat, menumbuhkan pelaku generasi dan penciptaan budaya. Orang-orang terdidik hasil pendidikan menjadi pelaku yang memahami betul generasi yang dijalannya untuk kemudian diperbaiki sesuai perkembangan zaman, dengan tetap mendasarkan pada budaya lama yang dimilikinya. Kelima, menjadikan konsumen barang dan jasa. Artinya menjadi generasi yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dengan jenis keperluan yang bervariasi dan lebih banyak. Mereka lebih kritis dalam menggunakan barang dan jasa, apabila dibandingkan dengan orang yang kurang terdidik.

Kerangka Berpikir

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan pendirian AK. AK saling berhubungan dan mendukung program pemerintah tentang MP3EI. Penerapan MP3EI sebagai upaya mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi, memerlukan tenaga kerja yang berkemampuan, berketerampilan, dan produktif. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkemampuan, berketerampilan, dan produktif tersebut diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan seperti AK. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan AK sewajarnya di arahkan pada penyesuaian bidang dan program studi dengan potensi daerah. Selain itu AK diharapkan dapat menarik animo lulusan SM, sehingga berimplikasi dengan meningkatkan APK Perguruan tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di AK Blitar, Jawa Timur pada bulan september 2013. Penelitian ini sebagian besar dibiayai dari APBN pusat penelitian kebijakan Balitbang Kemendikbud. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei. Metode survei adalah metode pengumpulan data secara langsung (primer). Data dan informasi studi juga dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion*

(FGD). Kegiatan FGD bertujuan untuk memperoleh data dan informasi primer berupa pendapat dari sejumlah pihak dalam rangka mengetahui ketersediaan Program Studi AK di kota Blitar dengan Potensi Daerah. Peserta FGD yaitu, perwakilan dari: Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, Bappeda Kota Blitar; Sekda Kota Blitar, Perguruan Negeri Malang, AK Kota Blitar, Kepala SMAN 1 Kota Blitar, Kepala SMKN 2 Kota Blitar. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner bertujuan untuk mengetahui animo lulusan SM melanjutkan ke AK. Responden dalam pengisian kuesioner adalah siswa SMAN 1 Kota Blitar dan SMKN 2 Kota Blitar. Sekolah tersebut dijadikan sampel mengingat lokasinya berada paling dekat dengan AK Kota Blitar. Siswa yang menjadi sampel penelitian adalah siswa kelas XII di SMA dan SMK sebanyak 62 siswa.

Analisis Data

Data dan informasi berasal dari lapangan di analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mendalami data dan informasi yang terkait dengan tujuan pertama yaitu ketersediaan Program Studi AK di kota Blitar dengan Potensi Daerah. Analisis kuantitatif berupa pemaparan kondisi dan situasi obyektif secara deskriptif, tanpa berupaya melakukan pengujian statistik. Hal ini dalam rangka mencari jawaban dari tujuan kedua yaitu untuk mengetahui animo lulusan SM untuk melanjutkan ke AK.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Kesesuaian Program Studi AK dengan Potensi Daerah

Pemerintah daerah Kota Blitar antusias dalam upaya menjabarkan konsep MP3EI melalui diskusi-diskusi untuk mengidentifikasi potensi ekonomi unggulan yang akan dikembangkan di wilayahnya. Berdasarkan hasil identifikasi, diperoleh beberapa potensi daerah yang perlu dikembangkan di Kota Blitar antara lain pada sektor pertanian, peternakan, pariwisata, perdagangan dan jasa.

Kendati demikian, minat masyarakat (lulusan SM) untuk mendalami potensi daerah melalui pendidikan sangatlah rendah. Hal ini dapat dilihat dari animo pilihan program/jurusan dari lulusan sekolah menengah di Kota Blitar yang ingin melanjutkan perguruan tinggi. Umumnya mereka lebih suka mengambil program/jurusan seperti administrasi perkantoran atau jurusan teknik. Alasannya cukup praktis, yakni supaya dapat bekerja di kantoran, terutama sebagai PNS. Pemerintah daerah sebetulnya telah berkomitmen dan berupaya untuk mengembangkan potensi daerah, akan tetapi karena tidak adanya minat dari masyarakat, akhirnya potensi daerah tersebut belum dapat dikembangkan secara maksimal. Padahal jika dilihat dari sektor peternakan hasilnya cukup menjanjikan. Misalnya peternakan ayam, kota Blitar termasuk pemasok telur dan daging ayam yang cukup besar untuk daerah sekitar di wilayah Jawa Timur.

Kendati unggulan di sektor pertanian dan peternakan cukup baik, tampaknya kurang diminati (khususnya peternakan). Hasil survei yang dilakukan dinas pendidikan Kota Blitar tahun 2012 mengenai peminatan siswa sekolah menengah terhadap program studi yang disukai di perguruan tinggi, menunjukkan program studi pertanian dan peternakan ternyata paling sedikit diminati oleh siswa sekolah menengah (kurang dari 1 persen). Oleh sebab itu, karena kurang atau tidak ada peminatnya maka prodi pertanian dan peternakan sementara ini belum di usulkan di AK Kota Blitar. Kondisi tersebut tentu belum sejalan dengan tujuan didirikannya AK.

Harapan didirikan AK Kota Blitar sebenarnya ialah untuk memberikan bekal keterampilan tambahan bagi lulusan pendidikan menengah memasuki dunia kerja sesuai dengan potensi daerah (Gumelar, 2012). Oleh karenanya, penyelenggaraan program studi di AK dituntut untuk memiliki kesesuaian dengan pengembangan potensi ekonomi wilayah dan kebutuhan akan tenaga kerja terampil yang dapat diserap oleh industri. Penyerapan lulusan ke dunia kerja

merupakan persyaratan utama dari penyelenggaraan AK.

AK Kota Blitar pada tahun perkuliahan 2012-2013 menyelenggarakan tiga program studi, yakni Program studi Administrasi Bisnis dengan konsentrasi Administrasi Perkantoran, Program studi Manajemen Informatika Konsentrasi Tehnologi Informatika, dan Program studi Manajemen informatika konsentrasi Multi Media. Apakah program studi yang diselenggarakan oleh AK Kota Blitar sudah sesuai dengan potensi ekonomi wilayah yang akan dikembangkan? Pelaksanaan FGD menunjukkan bahwa belum didapat kesamaan persepsi diantara peserta. Peserta yang berasal dari pihak yanb berasal dari perwakilan dari dinas pendidikan, akademi kominitas, dan Politeknik Negeri Malang berpendapat bahwa prodi tersebut sudah sesuai, sedangkan pihak lain yang berasal dari perwakilan dinas tenaga kerja, dinas pariwisata, Bappeda Kota Blitar dan Sekda Kota Blitar mengatakan kurang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Pihak yang cenderung mengatakan sudah sesuai beralasan bahwa program studi Administrasi Perkantoran, Program Studi Tehnologi Informatika, dan Multi Media dengan alasan bahwa lulusannya dibutuhkan di Kota Blitar baik oleh Pemda maupun masyarakat dunia usaha. Dengan demikian penentuan program studi tersebut telah selaras dengan pemenuhan kebutuhan daerah dan keunggulan lokal. Sedangkan pihak yang menyatakan belum sesuai memiliki alasan bahwa program studi AK tersebut belum sesuai, alasannya bahwa program studi AK Blitar jauh dari kebutuhan daerah dan keunggulan lokal. Program studi yang ada di AK sekarang memang dibutuhkan di Kota Blitar, tetapi bukan merupakan unggulan daerah, program studi tersebut juga dibutuhkan oleh setiap Kabupaten/Kota lainnya, selain itu perguruan tinggi diberbagai kota membuka prodi tersebut. Program studi tersebut sesungguhnya belum mengacu pada potensi ekonomi daerah yang sedang maupun akan dikembangkan untuk mendukung pembangunan daerah, seperti

sektor perdagangan, pertanian, peternakan, pariwisata dan jasa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebutuhan tenaga kerja daerah Kota Blitar dibedakan menjadi dua yaitu kebutuhan tenaga kerja yang bersifat umum dan khusus. Kebutuhan tenaga kerja yang umum merupakan tenaga kerja yang di butuhkan oleh hampir setiap daerah, seperti: ilmu komputer, otomotif, perkantoran, dan lain-lain, sedangkan kebutuhan tenaga kerja secara khusus merupakan tenaga kerja yang di butuhkan sesuai potensi daerah atau keunggulan lokal, seperti: perkebunan, perikanan, peternakan, perikanan, pariwisata dan lain-lain.

Dengan demikian, AK Kota Blitar masih kurang sesuai dengan potensi daerah. karena program studi hanya mewakili kebutuhan tenaga kerja secara umum saja, sedangkan program studi yang mendukung kebutuhan khusus sesuai potensi daerah tidak ada. Seharusnya program studi di AK selain menyediakan tenaga kerja secara umum juga menyediakan tenaga kerja secara khusus sesuai potensi daerah.

Animo Lulusan SM Melanjutkan di Akademi Komunitas

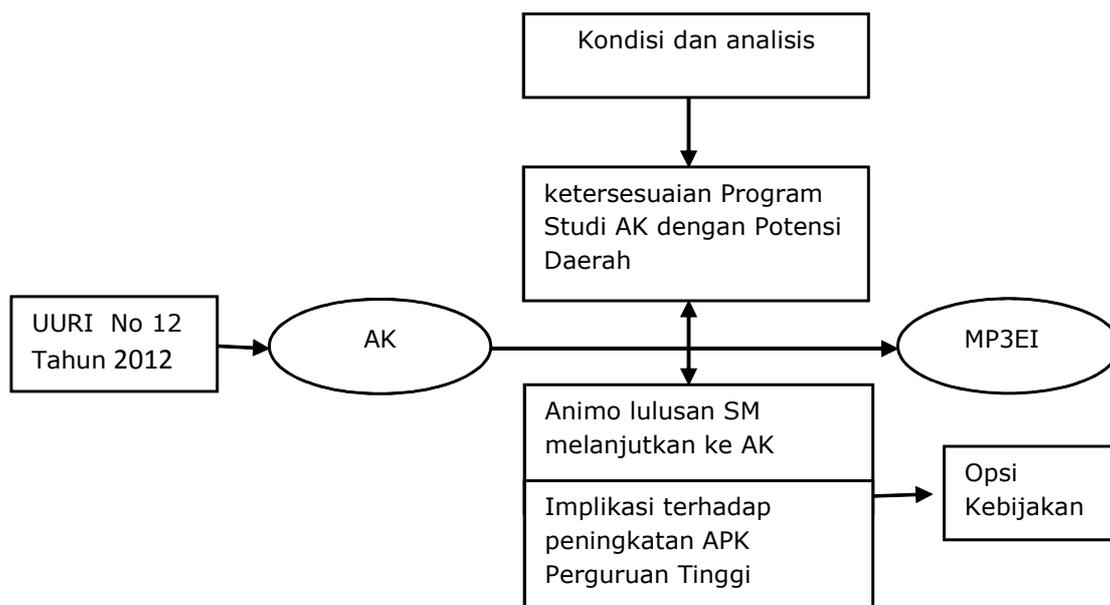
Keberadaan AK umumnya sudah diketahui masyarakat dan animo lulusan SM cukup tinggi untuk memasuki lembaga tersebut. Indikatornya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa siswa sekolah menengah yang telah mengetahui keberadaan AK Kota Blitar cukup tinggi sebesar 58%, sedangkan yang belum/tidak mengetahui keberadaan AK Kota Blitar sebesar 42% siswa. Selanjutnya, animo masyarakat terhadap AK Kota Blitar cukup besar, ini terlihat dari banyaknya siswa pendaftar di tahun 2012 dan 2013. Total pendaftar AK dan mengikuti tes tertulis pada tahun ajaran 2012-2013, yaitu sebanyak 250 orang dan yang di terima 151 orang. Hal ini berarti bahwa yang diterima 60,4% dari total pendaftar. Pada tahun ajaran 2013-2014 jumlah pendaftar meningkat menjadi 500 orang dan yang diterima 240 orang. Hal ini berarti

yang diterima 48% dari total pendaftar (lihat Grafik 2).

Disimak dari perkembangan mahasiswa AK, tampak bahwa baik siswa yang mendaftar ataupun yang diterima di AK Kota Blitar meningkat dari tahun 2012 ke tahun 2013. Selain itu persentase pendaftar yang diterima (tingkat keketatan) persentasinya semakin kecil, di tahun 2012 sebesar 60,4% dan tahun 2013 sebesar 48% yang artinya terjadi penurunan persentasi siswa yang diterima dan terjadi persaingan semakin ketat. Ini menunjukkan tingkat keketatan untuk masuk ke AK Kota Blitar semakin meningkat. Hal ini juga menunjukkan lulusan SM Kota Blitar dan sekitarnya memiliki animo yang tinggi, dan animo tersebut juga semakin meningkat dari tahun ketahun.

Menyimak grafik tersebut tampak bahwa belum semua siswa lulusan SM yang mendaftar di tahun 2012 dan 2013 dapat diterima dan tertampung di AK Kota Blitar. Hal ini terutama karena daya tampung AK di Kota Blitar sampai saat ini masih terbatas, kendati pemerintah telah menaikkan kuota mahasiswa AK dari tahun 2012 sebesar 151 mahasiswa menjadi lebih besar pada tahun 2013 sebesar 240 mahasiswa. Animo yang tinggi tersebut antara lain didukung oleh keinginan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi (PT) yang tinggi pula. Setelah menamatkan SMA/SMK umumnya (97%) siswa akan melanjutkan ke PT, sedangkan yang menjawab tidak akan melanjutkan ke PT hanya 3%. Ini berarti animo siswa menengah untuk melanjutkan ke perguruan tinggi sangat besar. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa banyak siswa yang menginginkan untuk melanjutkan pendidikan ke PT menghadapi kendala, terutama tidak semua orang tua mampu membiayainya, hal tersebut ditunjukkan pada Grafik 3.

Dari responden yang ingin melanjutkan pendidikan ke PT setelah menamatkan SMA/SMK, diketahui bahwa keluarga yang mampu membiayai pendidikan ke PT sebesar 73%, sedangkan yang menjawab tidak mampu membiayai untuk melanjutkan pendidikan ke PT



Grafik 2 Diagram Kerangka Berpikir

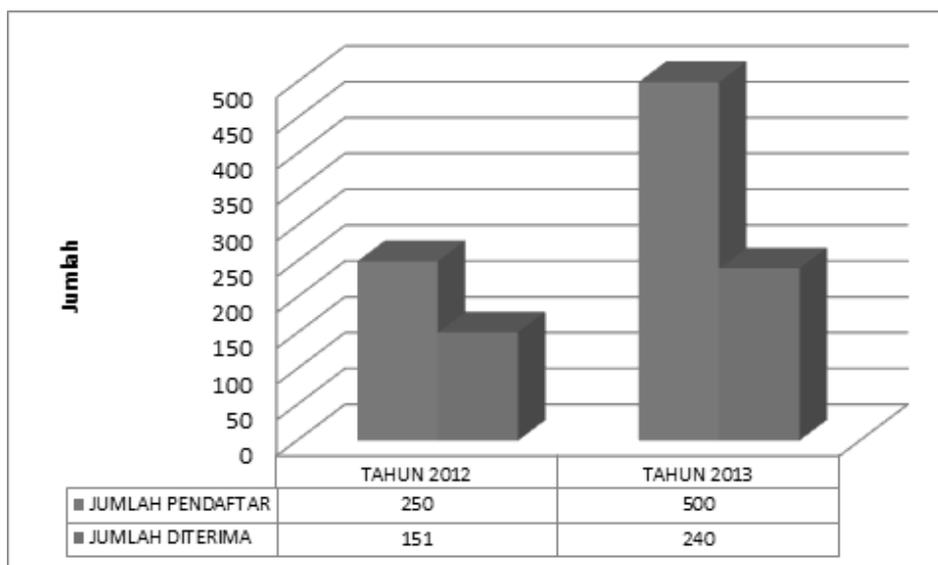
cukup besar yakni 27%. Keinginan melanjutkan ke PT sering terhambat karena lokasi perguruan tinggi yang diinginkan berada di daerah lain yang jauh dan tentu memerlukan biaya relatif besar, baik itu untuk biaya kehidupan maupun proses pendidikan. Munculnya sikap pesimistis adalah karena hampir sebagian besar responden mengaku berasal dari keluarga yang memiliki tingkat kemampuan sosial-ekonomi relatif rendah. Jadi untuk kuliah di luar daerah selain pembayaran semesteran yang mahal juga biaya hidup yang dinilai cukup tinggi dan tidak mampu ditanggung.

Sebagaimana dipahami bahwa jumlah siswa sekolah menengah yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi sangat besar (97%), namun dari siswa tersebut sebesar (27%) orangtuanya tidak mampu membiayai untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oleh sebab itu, lulusan sekolah menengah masih sedikit yang melanjutkan ke PT karena orangtuanya tidak mampu untuk membiayai melanjutkan ke pendidikan tinggi, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan cita-citanya kuliah di PT. Memang pemerintah telah menyediakan program beasiswa Bidikmisi bagi siswa miskin dan berprestasi. Namun beasiswa bidikmisi diperuntukan hanya bagi siswa miskin yang

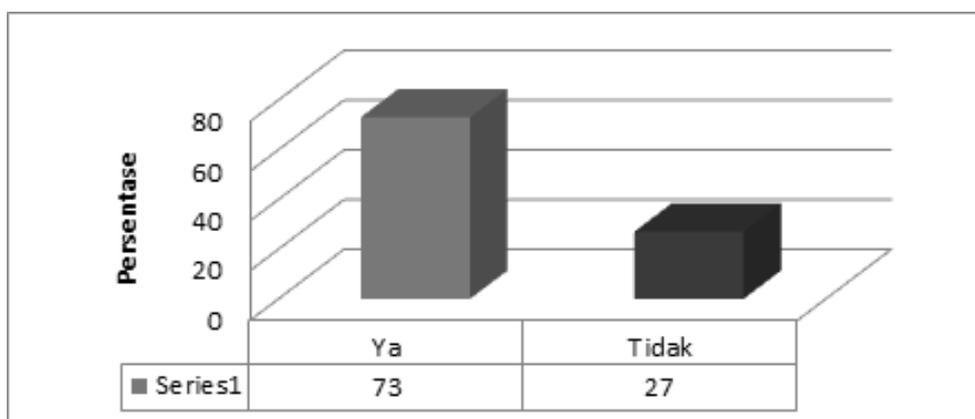
berprestasi, sementara bagi lulusan SM dengan status sosial kurang mampu (miskin) dan kurang berprestasi mereka tidak mendapatkan kesempatan memperoleh beasiswa bidikmisi, walaupun siswa tersebut mempunyai semangat belajar yang tinggi.

AK merupakan perguruan tinggi yang tepat untuk warga masyarakat yang kurang mampu, tetapi mempunyai motivasi belajar tinggi dan ingin cepat bekerja. Lebih-lebih AK lokasinya berada di Kabupaten/kota tempat mahasiswa bertempat tinggal, sehingga biaya pribadi dapat berkurang. Lokasi AK yang relatif dekat dengan tempat tinggal mahasiswa, sehingga biaya pribadi (transportasi, tempat tinggal dan biaya hidup lainnya) menjadi murah dan terjangkau. Strategi untuk mendekatkan lokasi AK dengan mahasiswa ditujukan agar siswa sekolah menengah yang berada di daerah pinggiran dapat melanjutkan pendidikan di PT tanpa mengeluarkan biaya yang tinggi.

Dengan demikian kebijakan pembangunan AK tersebut dapat menjangkau lulusan SM di semua wilayah dan dapat menghasilkan SDM yang mampu bekerja. Hal ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan". Jadi



Grafik 3. Jumlah pendaftar dan diterima tahun 2012 dan 2013 AK Kota Blitar



Grafik 4. Apakah keluarga mampu membiayai jika anda ingin melanjutkan pendidikan di PT

tidak hanya yang pintar atau yang kaya saja yang menikmati pendidikan di Indonesia.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Pertama, ketersediaan program studi AK Kota Blitar belum sepenuhnya sesuai dengan potensi daerah. Program studi AK Kota Blitar secara umum memang dibutuhkan sesuai di Kota Blitar, namun program studi AK Kota Blitar secara lebih khusus belum sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah yaitu di sektor pertanian, peternakan, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Kedua, Animo lulusan SM untuk mendaftar di AK Kota Blitar cukup tinggi. Animo lulusan SM masuk AK tersebut berimplikasi pada mening-

katnya APK perguruan tinggi, sekaligus berdampak dengan peningkatan SDM yang mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi Indonesia.

Saran

Pertama, dalam pendirian AK seyogyanya diperhatikan secara cermat persyaratan yang harus dipenuhi yaitu di antaranya terdapat minimal satu program studi potensi daerah dan program studi umum dan diantaranya terdapat kesesuaian. Untuk itu pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap program studi AK yang diselenggarakan di Indonesia khususnya di AK Kota Blitar melalui pemetaan kebutuhan yang cermat dan matang terhadap

potensi ekonomi wilayah yang dikembangkan, peninjauan ulang ini akan memungkinkan terjadinya keselarasan antara kebutuhan dengan produk lulusan yang dihasilkan oleh AK Kota Blitar. Kedua, mengingat animo lulusan SM untuk melanjutkan ke AK cukup tinggi, diharapkan

kuota/daya tampung AK dapat ditingkatkan, paling tidak 25 persen dari lulusan SM di Kota Blitar. Untuk menampung mahasiswa AK Kota Blitar dapat dibuka cabang di setiap kecamatan, sehingga mahasiswa dapat memasuki AK karena akses tersebut dapat tercapai.

Pustaka Acuan

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2012. *Akademi Komunitas*. Jakarta: Lokakarya Pengembangan Akademi Komunitas di Hotel Aston Marina.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2008. *Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Keunggulan dan Kearifan Lokal*.
- Ensiklopedia Bebas. 2014. *Pengertian Pendidikan*. <http://id.wikipedia.org/wiki/pendidikan>), diakses 9 Oktober 2014.
- Gumelar, D. S. 2012. *Urgensi Akademi Komunitas dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Lokakarya Pengembangan di Hotel Aston Marina.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 161/P/2012 tentang *Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili*.
- Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. 2014. *Latar Belakang Program MP3EI*. http://kp3ei.go.id/in/main_ind/content2/69/68. diakses 6 Oktober 2014.
- Martasuta, U.D. 2012. *Keunggulan lokal*. www.google.com M._UMAR_DJANI_Martasuta%2FB_UPI%2F9_Bhn_Plth_Sos_Workshop_KTSP%2F1_BAHAN_PAPARAN%2FPaparan_5%2FKeunggulan_Lokal. Diakses 10 Oktober 2014.
- Nuh, M. 2013. *Tingkatkan APK perguruan tinggi*. <http://news.okezone.com/read/2014/03/22/373/958999/tingkatkan-apk-perguruan-tinggi-ini-skenario-mendikbud>, diakses 10 Oktober 2014.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 Pasal 4 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI 2011-2025).
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat*. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Republik Indonesia. 2011. *Buku MP3EI: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Wahyono, B. 2012. *Peran Pendidikan dalam Pembangunan* <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/peran-pendidikan-dalam-pembangunan.html>, diakses 9 Oktober 2014.

Wikipedia Bahasa Indonesia. 2014. *Pengertian Efektivitas*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Efektivitas>, diakses 28 Oktober 2014.

